

ABSTRAK

Dalam kecelakaan kapal, nahkoda bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya dikarenakan suatu kesalahan atau kelalaiannya sehingga bisa diancam dengan sanksi pidana pelayaran. Tindak pidana pelayaran diatur dalam KUHP dan juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda di perairan Indonesia dan apa kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda diperairan Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda diperairan Indonesia dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda diperairan Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan, dan data penunjang adalah data-data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian, penegakan hukum harus berjalan kerana telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dimana nahkoda salah satunya yang bertanggungjawab dalam kecelakaan kapal. Kendala dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kecelakaan Kapal

ABSTRACT

In a ship accident, the captain can be one of the contributing factors due to an error or negligence so that it can be threatened with shipping criminal sanctions. The crime of shipping is regulated in the Criminal Code and also regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. The problems raised in this study are how to enforce the law on ship accidents due to the negligence of the captain in Indonesian waters and what are the obstacles in law enforcement of the crime of ship accidents due to the negligence of the captain in Indonesian waters associated with Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. The purpose of this research is to find out the law enforcement of the crime of ship accidents due to negligence of the captain in Indonesian waters and to find out the obstacles in law enforcement of the crime of ship accidents due to the negligence of the captain in Indonesian waters associated with Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. In this study, the method used is an empirical juridical approach because the main data used is primary data, namely in the form of data obtained based on field studies, and supporting data is secondary data, namely in the form of data obtained based on library studies. As for the results of the research, law enforcement must run because it has been explained in the legislation where the captain is one of them who is responsible for ship accidents. Constraints in law enforcement there are several factors that influence it.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Ship Accident*

